

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yang sampai saat ini belum mampu menyelesaikan masalah tersebut. Di Indonesia kemiskinan meliputi beberapa masalah yang berkaitan dengan aspek ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kemiskinan dapat mengakibatkan dampak bagi semua kalangan, baik masyarakat maupun negara, dikarenakan masyarakat yang tergolong miskin belum mampu melakukan kegiatan ekonomi dan sosial dengan baik.<sup>1</sup>

Dalam prinsipnya, kemiskinan menggambarkan suatu kondisi tidak adanya kepemilikan serta rendahnya pendapatan yang diperoleh atau suatu kondisi dimana masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu pangan, papan dan sandang. Hal ini juga terdapat dalam BPS yang mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan dasar hidup yang memadai.<sup>2</sup>

Bahkan, BPS juga menjelaskan kemiskinan berdasarkan pada garis kemiskinan. Nilai garis kemiskinan yang dipakai dalam menentukan kemiskinan didasarkan pada kebutuhan minimum yang diperlukan oleh manusia yakni 2100 kalori perkapita per hari, yang ditambahkan dengan kebutuhan dasar seseorang yang berarti kebutuhan selain makanan, yakni sandang, sekolah, papan, transportasi, kebutuhan rumah tangga dan orang yang mendasarinya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ika Widiastuti, *Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Kemandirian Pangan dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021), 6.

<sup>2</sup> Ibid., 7.

<sup>3</sup> Erwan Agus Purwanto, "Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 10, No. 4, (2007), 300.

Dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia, Pemerintah menyalurkan beberapa bantuan yang dapat mengurangi kemiskinan seperti bantuan sosial tunai (BST). Bantuan Sosial Tunai yang biasa disebut dengan BST merupakan salah satu bantuan sosial dari pemerintah secara tunai melalui Kementerian Sosial RI untuk membantu masyarakat kurang mampu di Indonesia.<sup>4</sup> Efektivitas bantuan sosial tunai dinilai belum efektif dikarenakan masih adanya ketidaksesuaian antara data yang ada di kantor pos dan dinas sosial, update data yang belum maksimal, terdapat masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan, penerima manfaat yang merasa tidak puas dikarenakan bantuan yang diberikan tidak sebanding dengan harga kebutuhan pokok saat ini.<sup>5</sup> Kemudian untuk meningkatkan keefektifan tersebut Presiden Republik Indonesia memberikan pengarahan supaya bantuan sosial maupun subsidi dapat disalurkan secara non tunai. Bantuan Sosial Non Tunai yang disalurkan melalui sistem perbankan bisa mendorong perilaku produktif di antara penerima manfaat dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas program, sehingga lebih mudah dalam mengontrol, mengawasi dan meminimalkan penyelewengan yang ada.

Bantuan Pangan Nontunai atau biasa disebut BPNT ialah Bantuan Sosial dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan secara nontunai dengan melalui uang elektronik yang dapat dipakai untuk membeli kebutuhan bahan makanan di *e-warong*.

---

<sup>4</sup> David Myoga, "Bantuan Sosial Tunai 2021", *Kementerian Sosial Republik Indonesia*, 1 Februari 2021, <https://kemensos.go.id/bantuan-sosial-tunai-2021> (Diakses pada tanggal 22 Februari 2023, 17.00 WIB).

<sup>5</sup> Sang Ayu Made Regitha Megartha, "Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kabupaten Gianyar", *Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, Vol. 2 No. 1 (2022) 43.

Adapun tujuan dari adanya Program Bantuan Pangan secara non tunai adalah untuk memberikan kepada masyarakat yang kurang mampu nutrisi yang lebih seimbang dan memberikan alternatif pilihan serta kendali, meningkatkan ketepatan penerima manfaat, memajukan usaha rakyat, memberikan akses jasa keuangan kepada masyarakat yang kurang mampu, serta mengefektifkan anggaran. Diharapkan dengan adanya pendistribusian bantuan pangan secara non tunai bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan keuangan keluarga penerima manfaat (KPM).<sup>6</sup>

Pelaksanaan pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) perlahan-lahan meluas ke seluruh Indonesia, salah satunya di Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri merupakan salah satu dari 38 Kabupaten atau Kota yang terdapat di provinsi Jawa Timur. Kabupaten Kediri berada di sebelah selatan provinsi Jawa Timur yang membentang antara 111° 47' 05" s/d 112° 18' 20" BT dan 7° 36' 12" s/d 8° 0' 32" LS. Luas wilayah Kabupaten Kediri adalah sebesar 1.563,42 km<sup>2</sup> atau 153.642 Ha yang terbagi dalam 26 Kecamatan dengan 344 Kelurahan atau Desa.<sup>7</sup>

Kabupaten Kediri memiliki keragaman wilayah agraris, dataran tinggi, dan perkotaan yang memungkinkan analisis efektivitas BPNT pada kondisi sosial-ekonomi yang berbeda. Selain itu, dalam penyaluran BPNT di Kabupaten Kediri masih menghadapi kendala terkait ketepatan sasaran dan penyaluran berdasarkan penelitian sebelumnya. Program Bantuan Pangan Non Tunai dilaksanakan di Kabupaten Kediri sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan yang ada di daerah tersebut. Sesuai dengan angka presentase kemiskinan

---

<sup>6</sup> Tim Pengendali Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai 2019* (Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2019), 3.

<sup>7</sup> Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2021, 9.

yang masih mengalami kenaikan, khususnya karena adanya pandemi covid-19. Berikut tabel presentase perbandingan presentase penduduk miskin tahun 2025:<sup>8</sup>

**Tabel 1.1**  
**Data Perbandingan Presentase Penduduk Miskin Tahun 2025**

No	Kabupaten atau Kota	Jumlah Penduduk Miskin
1	Trenggalek	10,29 %
2	Kabupaten Kediri	9,81 %
3	Blitar	7,57 %
4	Tulungagung	5,96 %

Sumber: Data BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa Kabupaten Trenggalek memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi diantara kabupaten perbatasan yaitu 10,29%. Kabupaten Kediri yang menjadi lokasi penelitian berada di peringkat kedua dengan jumlah penduduk miskin 9,81%. Namun pemilihan lokasi ini, bukan pada peringkat jumlah kemiskinan yang tertinggi. Perbandingan ini disajikan untuk menunjukkan bahwa kabupaten Kediri memiliki beban kemiskinan yang signifikan.

Kecamatan Wates ialah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kediri dengan luas 71,88 km<sup>2</sup> dari 26 kecamatan yang ada.<sup>9</sup> Kecamatan Wates memiliki 18 Desa yang salah satunya adalah Desa Jajar. Desa Jajar mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3.341 orang jiwa yang terbagi ke dalam 2 Dusun, 28 Rukun Tetangga (RT) dan 5 Rukun Warga (RW), dimana 1.688 penduduk laki-laki dan 1.653 penduduk perempuan bertempat tinggal. Penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jajar dimulai sejak tahun 2019 dengan tujuan

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, "Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Persen) 2025, *Badan Pusat Statistik*, <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDk3IzI=/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html> (Diakses pada tanggal 14 Mei 2026).

<sup>9</sup> Mohammad Arief Aji Nugroho dkk, *Kecamatan Wates Dalam Angka 2021* (Kediri: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2021), 3.

untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat dengan memenuhi sebagian kebutuhan pangan masyarakat yang kurang mampu.

Berikut jumlah penduduk miskin desa Jajar dan jumlah penerima bantuan BPNT desa Jajar mulai dari tahun 2019-2025:

**Tabel 1.2**  
**Data Jumlah Penduduk Miskin dan Jumlah Penerima Bantuan BPNT Desa Jajar**

No.	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penerima Bantuan BPNT
1	2019	480	200 KPM
2	2020	540	230 KPM
3	2021	530	237 KPM
4	2022	525	230 KPM
5	2023	532	230 KPM
6	2024	530	225 KPM
7	2025	520	220 KPM

Sumber: Data Desa Jajar

Di desa jajar dengan jumlah penduduk sekitar 1.163 KK terdapat beberapa yang mendapatkan bantuan dari pemerintah salah satunya adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pada tahun 2025 Desa Jajar dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 520 dengan banyak penerima bantuan 220 KPM BPNT, sehingga lebih dari 40% rumah tangga miskin bergantung pada program ini. Karakteristik desa yang agraris dengan pertanian tadah hujan membuat pendapatan masyarakat bersifat musiman dan rentan kerawanan pangan. Bantuan BPNT didistribusikan melalui *e-warong* diharapkan mampu mendistribusikan bantuan sosial secara lebih efektif dan efisien. Seiring dengan berjalannya waktu penerima manfaat BPNT mulai berkurang dikarenakan beberapa faktor.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan ditemukan bahwa penyaluran bantuan sosial BPNT di desa Jajar dinilai belum tepat sasaran yang menimbulkan kecemburuan sosial diantara warga masyarakat yang merasa belum mampu, rata-rata

penerima BPNT yang tergolong ibu-ibu masih muda, bahkan terdapat masyarakat yang lebih berhak mendapatkan bantuan tersebut tetapi tidak terdaftar dalam DTKS. Serta belum adanya ketepatan administrasi dimana adanya ketidaksesuaian nama di KTP dengan kartu KKS yang mengakibatkan bantuan tidak bisa diterima masyarakat KPM.<sup>10</sup>

Sistem distribusi yang baik sangat diperlukan dalam pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada masyarakat. Dalam Islam, distribusi yang baik dapat menjamin pendapatan ekonomi dan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dalam sistem ekonomi Islam, kebijakan distribusi sangat menjunjung tinggi nilai keadilan. Sehingga ada landasan penting dalam distribusi Islam sebagai pedoman supaya harta tidak terkumpul dalam satu kelompok tertentu saja seperti pada QS. al-Hasyr ayat 7. Dalam menyeimbangkan keuangan masyarakat, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat didistribusikan dengan prinsip keadilan distribusi, kepemilikan dalam islam, larangan riba dan gharar serta larangan menumpuk harta.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM PERSPEKTIF DISTRIBUSI ISLAM (Studi Pada Desa Jajar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)”**.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Asta Wulandari, Kepala Desa Jajar, 20 November 2023.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti dapat merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jajar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jajar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Dalam Perspektif Distribusi Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka peneliti dapat merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jajar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jajar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Dalam Perspektif Distribusi Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti dalam melaksanakan penelitian ini mengharapkan adanya manfaat yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan dan pemahaman terkait efektivitas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam perspektif distribusi Islam dan sebagai bahan rujukan untuk penelitian mendatang.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman dan wawasan terkait efektivitas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam perspektif distribusi Islam, serta sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir.

### b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai bahan masukan dan informasi perbendaharaan perpustakaan IAIN Kediri, serta sebagai acuan dalam penelitian mendatang.

### c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai sumber informasi dan rujukan untuk para pembaca terkait topik-topik yang berkaitan baik yang bersifat melengkapi maupun lanjutan.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian, sehingga peneliti menggunakan telaah pustaka sebagai berikut:

1. *Efektivitas Program E-Warong Sanjaya 2 Kelurahan Banjaran Kota Kediri Ditinjau Dari Distribusi Islam* oleh Risma Yuni Almatien (2022), Skripsi mahasiswi IAIN Kediri. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program *e-warong* Sanjaya 2 di Kelurahan Banjaran Kota Kediri dinilai kurang efektif. Pada pelaksanaan Program *e-warong* telah dilaksanakan sosialisasi program kepada pengelola dan penerima KPM,

mesin EDC yang berguna untuk membantu proses distribusi dan peraturan baru yang mempermudah KPM dalam mendapatkan bantuan di *e-warong* terdekat. Namun, masih ada beberapa yang belum bisa berjalan dengan optimal karena kendala yang terjadi dalam pendistribusiannya yaitu mesin EDC tidak ada jaringan dan kartu KKS mengalami saldo kosong. Pendistribusian program *e-warong* Sanjaya 2 sudah berjalan dengan prinsip dan tujuan distribusi Islam, dimana pihak pengelola *e-warong* Sanjaya 2 tidak melakukan ketidakadilan, penipuan atau pemalsuan yang berkaitan dengan distribusi program. Hal ini sesuai dengan prinsip distribusi Islam yang menjelaskan bahwa segala sesuatu harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Namun, terdapat beberapa prinsip yang belum diterapkan yakni penerima bantuan tidak membelanjakan sesuai dengan komponen yang diterima dan masih terdapat penerima yang menjual kembali bahan pangan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai distribusi dalam Islam dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya peneliti membahas tentang Efektivitas Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perspektif Distribusi Islam.

2. *Efektivitas Program (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri* oleh Elvin Rahma Hidayati (2021), Skripsi mahasiswa IAIN Kediri. Hasil penelitian yang didapatkan pada penelitian menunjukkan bahwa implementasi program PKH di desa Siman telah sesuai dengan aturan dan arahan yang dianjurkan terkait kebijakan dan aturan serta mekanisme yang ada dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan

tahapan penyaluran PKH yaitu verifikasi, validasi, sosialisasi atau pertemuan awal, pencairan atau penyaluran bantuan, pembentukan kelompok, pertemuan kelompok dan pemutakhiran data peserta PKH. PKH di desa Siman yang dimulai sejak tahun 2009 dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dapat dikatakan belum efektif, karena berdasarkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa belum meningkatnya jumlah graduasi setiap tahunnya. PKH dapat dikatakan tidak efektif dan efektif melalui variabel pengukuran efektivitas dan indikator efektivitas PKH. Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pandangan ekonomi Islam dapat dilihat dari nilai ekonomi Islam yaitu keadilan, tanggung jawab dan jaminan sosial. Pada penerapannya PKH masih sebatas bentuk jaminan sosial pemerintah untuk masyarakat dalam mendorong terciptanya hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat, sedangkan nilai keadilan dan tanggung jawab kurang terlaksana dengan baik karena masih ditemukannya ketidaktepatan sasaran dalam penggunaan dana bantuan tersebut. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai program pemerintah dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya peneliti membahas tentang Efektivitas Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perspektif Distribusi Islam.

3. *Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh* oleh Aura Ziah Adinda (2021), Skripsi mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Hasil penelitian yang didapatkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program BPNT di Gampong Seutui dikatakan belum efektif karena masih terdapat masyarakat yang belum menerima BPNT padahal

layak untuk menerima, tidak disiplin dalam penyaluran, masih adanya kesilapan data, dan kualitas barang yang diberikan kurang bagus. Dalam proses pemindahbukuan dari rekening Kemensos ke rekening KPM sering terjadi keterlambatan yang mengakibatkan terjadinya kemacetan dalam penyaluran bantuan tersebut. Pada pelaksanaan program terdapat beberapa hambatan dan tantangan seperti gangguan jaringan, adanya masyarakat yang tidak patuh dengan arahan yang diberikan oleh TKSK. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sedangkan perbedaannya peneliti membahas tentang Efektivitas Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai Dalam Perspektif Distribusi Islam.

4. *Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa* oleh Karmila (2022), Skripsi mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar. Hasil penelitian yang didapatkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program BPNT dikatakan belum maksimal dalam indikator tepat sasaran, hal ini menyebabkan timbulnya rasa kecewa masyarakat pada pelaksana BPNT dan pelaksana BPNT tidak mendata dengan baik terkait masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dan dalam pendistribusian bantuan kurang tepat waktu sehingga jumlah yang didapatkan oleh keluarga penerima manfaat tidak sesuai dengan jumlah bahan pangan yang diberikan. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sedangkan perbedaannya peneliti membahas tentang Efektivitas Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai Dalam Perspektif Distribusi Islam.

5. *Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Yogyakarta* oleh Iwan Hermawan, Izzaty, Eka Budiyanti, Rafika Sari, Yuni Sudarwati dan Mohammad Teja, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 12, No. 2, 2021. Hasil penelitian yang didapatkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan BPNT di Kota Yogyakarta sudah berjalan efektif, akan tetapi masih terdapat beberapa catatan berdasarkan indikator prinsip 6T. Catatan tersebut berkaitan dengan kinerja dari dimensi administrasi kurang optimal jika dibandingkan dengan dimensi lainnya dan masih terdapat beberapa atribut yang menyusun dimensi sasaran, waktu, kualitas, dan jumlah yang berjalan di bawah kapasitasnya yang bisa ditingkatkan kinerjanya. Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan BPNT di Kota Yogyakarta dan memastikan dimensi-dimensi yang telah berjalan bisa meningkat kinerjanya, sehingga peran *e-warong* sangat krusial yakni mencakup pelayanan distribusi penyaluran bantuan pangan, memberdayakan masyarakat miskin serta meningkatkan akses rumah tangga miskin terhadap layanan keuangan inklusif. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Bantuan Pangan Nontunai dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya peneliti membahas tentang Efektivitas Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai Dalam Perspektif Distribusi Islam.